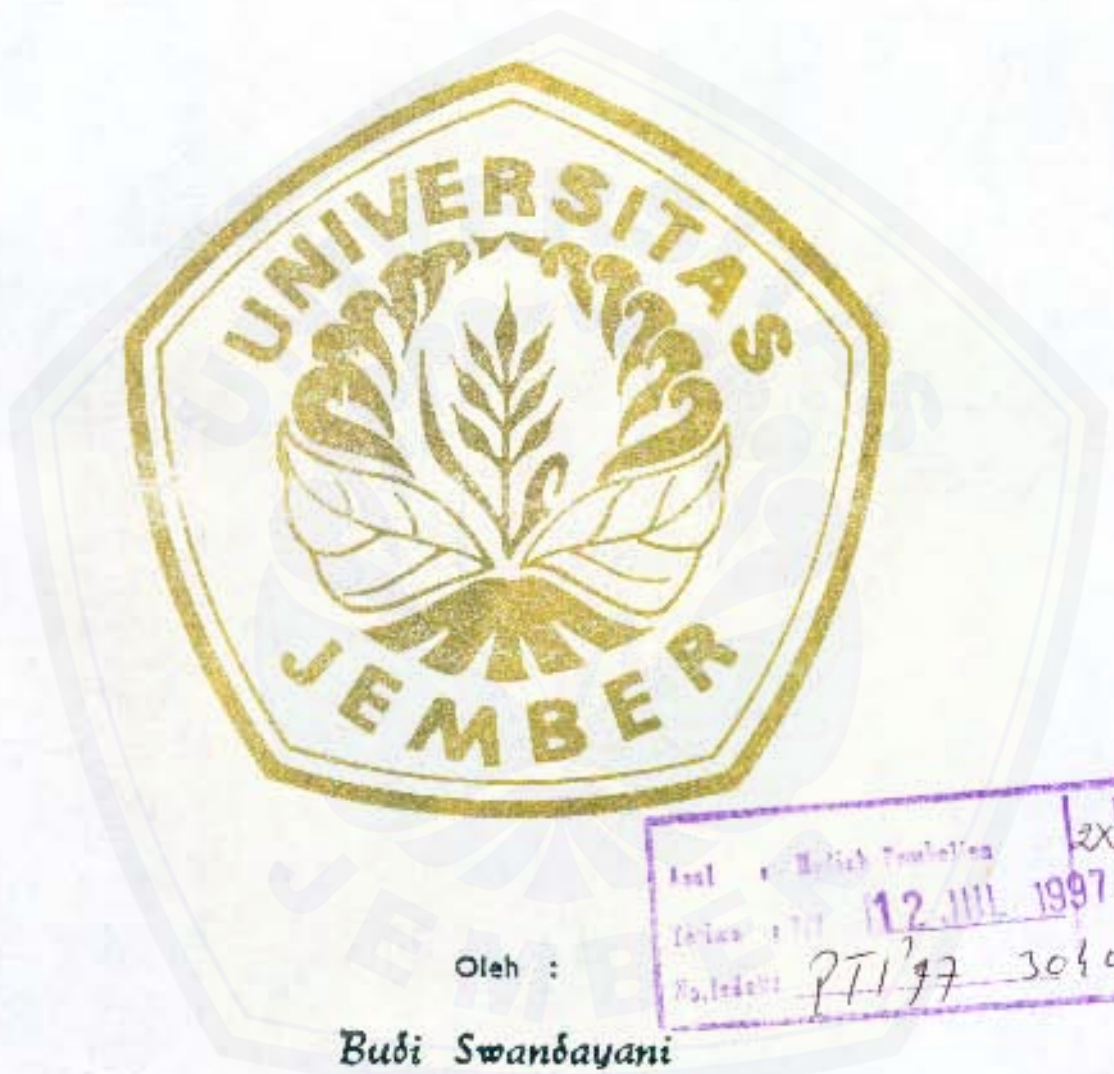


**PENGARUH KONFLIK POLITIK DALAM TUBUH MASYUMI  
TERHADAP PEROLEHAN HASIL PEMILU 1955**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Budi Swandayani**

NIM : 9102105264

Asal	U. Jember	KLASIFIKASI	2X6.208
Tanggal	12. JUNE 1997	SWA	
No. Indent	PTI'97	3040	166

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
JUNI 1997**

MOTTO :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران ١٠٣)

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai"  
(Q.S Ali Imran : 103)



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Calon suamiku yang tercinta;
3. Saudara-saudareku yang aku sayangi;
4. Guru-guruku yang terhormat;
5. Teman-teman senasib seperjuangan;
6. Almamater yang kujunjung tinggi;



PENGARUH KONFLIK POLITIK DALAM TUBUH MASYUMI  
TERHADAP PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 1955

S K R I P S I

Diajukan Untuk Dipertahankan di Depan Tim Penguji Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dengan Spesialisasi Program Pendidikan Sejarah Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Oleh

Nama Mahasiswa : Budi Swandayani  
N I M : 9102105264  
Angkatan Tahun : 1991  
Daerah Asal : Magetan  
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan 12 - 8 - 1971  
Jurusan/Program : Pendidikan Ilmu Sosial/  
Pendidikan Sejarah

Disetujui oleh :

Pembimbing I



DRA. SRI HANDAYANI  
NIP. 131 472 786

Pembimbing II



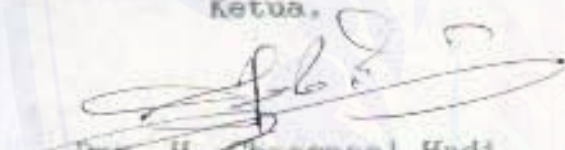
DRS. SUTJIPTO  
NIP. 131 577 287

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji, dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai Skripsi :


Pada hari : Rabu  
Tangga : 25 Juni 1997  
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

  
Drs. H. Chosenoel Hadi  
NIP. 130 145 576

Sekretaris,

  
Drs. Sutjipto  
NIP. 131 577 287

Anggota :

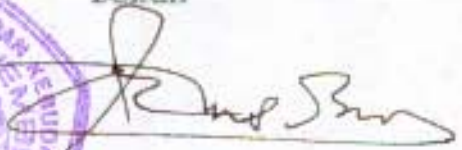
1. Drs. H. Miano MPd.  
NIP. 130 937 191
2. Drs. Sumarno  
NIP. 131 403 352
3. Dra. Sri Handayani  
NIP. 131 472 786

  
( ..... )  
  
( ..... )  
  
( ..... )

Mengetahui,

Dekan



  
Drs. Soekardjo BW  
NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyarakat Terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilu 1955"

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis sampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Ketua Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Dosen Pembimbing I dan II;
6. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Jember, 25 Juni 1997

Penulis,

RINGKASAN

Budi Swandayani, Juni 1997, Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyumi Terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilu 1955.

Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, FKIP Universitas Jember.

Pembimbing : (1) Dra. Sri Handayani  
(2) Drs. Sutjitro

**Kata Kunci** : Konflik Politik Masyumi, Perolehan Suara Pemilu 1955.

Konflik politik dalam tubuh Masyumi pada masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer, telah menyebabkan Masyumi kehilangan pendukungnya. Munculnya kepentingan individu dan keinginan untuk menduduki suatu jabatan dalam kabinet telah mengalahkan semangat persaudaraan secara Islam. Sehingga menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 Masyumi hadir dengan kekuatan yang terpecah belah.

Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis gunakan maka permasalahan yang muncul adalah : "Bagaimanakah Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyumi Terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilu 1955 ?

Suatu penelitian yang bertujuan ingin mengungkap secara jelas dan mendalam mengenai pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi terhadap perolehan suara hasil pemilu 1955 pada masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Penelitian ini dilakukan selama 14 bulan, yaitu mulai bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Juni 1997. Adapun kegiatannya meliputi pencarian sumber, kritik sumber, interpretasi sampaimenjadi naskah skripsi. Sesuai dengan metode sejarah (Historical Method), khususnya metode bibliografis atau kepustakaan, maka manifestasinya penulis menggunakan perpustakaan sebagai tempat penelitian.

Penulis mengharapkan agar penelitian ini mempunyai manfaat bagi pembaca, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan. Pertama, bagi penulis memberikan pengalaman berharga dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu sejarah. Kedua, bagi calon guru sejarah : membantu memenuhi salah satu kompetensi guru terutama aspek penguasaan materi. Ketiga, bagi almanater : hasil penelitian ini dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa atau peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis dengan lebih mendalam dalam rangka pelaksanaan dharma penelitian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, selanjutnya hasil penelitian ini akan menambah khasanah perpustakaan Universitas Jember. Keempat, bagi peneliti-peneliti sejarah : hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lain secara lebih mendalam.

Bagian akhir dari naskah skripsi ini, penulis tutup dengan bab kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasan masalah dan penyajian hipotesis adalah : Pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi terhadap perolehan suara hasil pemilu 1955 ialah kekuatan Masyumi menjadi terpecah menjelang pemilu 1955. Sehingga dalam pemilu 1955 perolehan suara Masyumi menjadi berkurang. Komposisi jumlah anggota DPR sebelumnya di tahun 1954 adalah : Masyumi sebanyak 54 orang, PNI 42 orang, PKI 17 orang, NU delapan (8) orang, dan PSII empat (4) orang. Setelah Pemilu 1955 hasilnya Masyumi mendapat 57 kursi, PNI 57 kursi, PKI 39 kursi, PSII delapan (8) kursi, dan NU 45 kursi. Meskipun Masyumi dan PNI jumlah kursinya sama, namun PNI lebih unggul dalam perolehan suara di seluruh Indonesia.

Saran-saran dalam penelitian ini adalah : pertama, bagi calon guru sejarah, hendaknya berusaha bersikap obyektif dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian sejarah; kedua, bagi sejarawan, hendaknya terus menggali fakta-fakta sejarah yang ada dan terus berusaha mengembangkan hasil-hasil penelitian yang belum sempurna; ketiga, bagi generasi muda, hikmah dari peristiwa di atas dapat dijadikan pelajaran agar tak membeda-bedakan sosio-kultural keagamaan; keempat, bagi almamater, hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa atau peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis dengan lebih mendalam dalam rangka pelaksanaan dharma penelitian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Demikianlah ringkasan penelitian ini, untuk penjelasan yang lebih rinci dapat disimak dalam bab-bab yang telah penulis deskripsikan pada naskah skripsi ini.



UNIVERSITAS JEMBER



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
RINGKASAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan ...	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul .....	5
1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan ..	8
1.3.1 Ruang Lingkup .....	8
1.3.2 Rumusan Permasalahan .....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....	11
2.1 Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi.	11
2.2 Kondisi Sosial Politik di Indonesia Tahun 1945 - 1955 .....	15
2.3 Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyumi Terhadap Pemilu 1955 .....	18
2.4 Hipotesis Penelitian .....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	22
3.1 Pengertian Metode Penelitian .....	22
3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah ....	24
3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian .....	29

3.4	Metode Pengumpulan Data .....	30
3.5	Metode Analisis Data .....	31
3.5.1	Logika Komparatif .....	32
3.5.2	Logika Induktif .....	33
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Latar Belakang Berdirinya Masyumi.....	34
4.1.1	Keadaan Masyumi Pada Masa Pendudukan Jepang .....	34
4.1.2	Masyumi Sebagai Wadah Berpolitik Bagi Umat Islam .....	39
4.2	Kondisi Sosial Politik di Indonesia Tahun 1945-1955 .....	44
4.2.1	Masa Demokrasi Liberal.....	44
4.2.2	Kondisi Politik Dalam Masyumi.....	50
4.2.2.1	Munculnya Aliran-Aliran dalam Tubuh Umat .....	53
4.2.2.2	Sistem Organisasi Tidak Se- imbang Menjelang Pemilihan Umum 1955 .....	55
4.2.3	Konflik Intern Dalam Tubuh Umat....	57
4.2.3.1	Konflik Antara Masyumi-PSII NU .....	58
a.	Konflik Antara Masyumi - PSII .....	58
b.	Konflik Antara Masyumi - NU .....	60
4.2.3.2	Konflik Antara Natsir dan Soekiman.....	63
4.3	Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyumi Terhadap Pelaksanaan Pemilu 1955 .....	67
4.3.1	Berkurangnya Massa Masyumi Karena Beralih Ke Partai Lain .....	67

BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan .....	74
	5.2 Saran-Saran .....	74
KEPUSTAKAAN .....		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	Matrik Penelitian .....	80
2.	Susunan Pengurus Besar Masyumi Serta Majelis Syuro 7 Nopember 1945 .....	81
3.	Hasil Pemilu 1955 .....	83
4.	Perolehan kursi Anggota Dewan Konstituante 15 Desember 1955 .....	84
5.	Surat Keterangan Telah Mengadakan Studi Literatur dari Kepala Perpustakaan.	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Dalam bulan-bulan terakhir pada tahun 1943 telah terjadi perubahan dalam perjalanan kehidupan politik di Indonesia. Tampilnya Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai wadah bagi umat Islam dibawah pimpinan KH. Hasyim Asy'ari telah memberikan harapan yang baik untuk menata kembali kehidupan politik bangsa Indonesia yang pada masa sebelumnya mengalami kegagalan (Harry,J.Benda, 1958:184).

MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang sebelumnya sebagai wadah bagi umat Islam tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pihak Jepang sehingga dalam perkembangannya lambat. Disamping itu Jepang mulai sadar bahwa ulama punya pengaruh yang sangat besar dikalangan rakyat yang mayoritas muslim, maka pada akhirnya MIAI dibubarkan tahun 1943 (Harry.J.Benda, 1958:183).

Tampilnya Masyumi sebagai partai Islam yang bercorak kesatuan setelah kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu peristiwa kebetulan dalam sejarah (an historical accident). Masyumi lahir dapat dikatakan sebagai keharusan sejarah (an historical necessity) bagi perjalanan politik umat Islam di Indonesia. Dilihat dari peranannya lebih banyak menjadi saluran untuk menyatakan keluh kesah rakyat dan wadah perjuangan (Syafii Msarif, 1988:17, Rusli Karim, 1983:69).

Masyumi pada tahun 1950-an sudah terlihat ketanggubannya karena dipimpin oleh para cendekiawan dan ulama terkemuka. Pada tahun 1950-an inilah berlaku demokrasi Liberal dengan sistem parlementer yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Demokrasi liberal hanya mengutamakan kepentingan individu dan golongan, sedangkan demokrasi Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Masyumi sebagai salah satu wadah bagi umat Islam mampu mewakili aspirasi umat. Dari sini pula sumber kekuatan Islam dalam politik di Indonesia sehingga Islam menjadi kekuatan yang tangguh. Keanggotaan Masyumi terdiri atas gabungan empat perkumpulan besar yang bernafaskan Islam yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Kedua organisasi ini yaitu Perikatan dan Persatuan Umat Islam Indonesia pada tahun 1952 bersatu menjadi Persatuan Umat Islam (Rusli Karim, 1983:71, Harun Nasution, 1992:627).

Tujuan yang ingin dicapai oleh Masyumi pada awalnya adalah memperkuat keatuan semua organisasi Islam dan membantu Dai Nippon dalam kepentingan Asia Timur Raya. Dengan membantu Dai Nippon untuk kepentingan Asia Timur Raya sesuai dengan perintah Allah, selain itu juga untuk mengusir penjajah. Dari pendapat tersebut jelas bahwa Islam disalah tafsirkan untuk kepentingan penjajah ( Harry.J.Benda,1958:185).

Dalam perkembangan selanjutnya tujuan Masyumi adalah menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan keagamaan. Cara yang ditempuh adalah: 1. Menginsyafkan dan memperluas kecakapan umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik. 2. Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam (Rusli Karim, 1983:68).

Tujuan ini sulit sekali diwujudkan karena persatuan dan kesatuan umat Islam itu hanya bisa bertahan kira-kira pertengahan tahun 1948. Aktifnya kembali PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) dalam kancah politik telah mendorong partai ini keluar dari Masyumi. Selanjutnya disusui pula oleh NU pada tahun 1953 dan Muhammadiyah tahun 1960, sehingga kekuatan Masyumi menjadi berkurang (Moh. Syafaat Mintaredja, 1988:17).

Secara politis konflik dalam tubuh Masyumi ini disebabkan oleh persaingan politik dari partai-partai yang tergabung dalam Masyumi untuk mengangkat partainya supaya menjadi partai yang besar menjelang pemilu. Disamping itu ingin menduduki jabatan kabinet pada masa demokrasi liberal. Keluarannya PSII dari Masyumi didorong oleh keinginan untuk memperoleh posisi dalam kabinet Amir Syarifudin I (3 Juli - 11 November 1947) karena merasa tidak ada waktu lagi untuk memperoleh kedudukan penting dalam kabinet. Keadaan ini semakin parah dengan memburuknya hubungan antara tokoh-tokoh PSII dengan tokoh-tokoh Masyumi. Amir Syarifudin dari Partai Sosialis berusaha memfaatkan pergolakan dalam tubuh Masyumi untuk kepentingan pribadinya. Demikian juga dengan NU yang keluar dari Masyumi oleh karena masalah perebutan jabatan Menteri Agama pada masa kabinet Wilopo. Disamping itu juga adanya anggapan terhadap NU bahwa santri-santri dan kiai-kiai yang kebetulan banyak menjadi anggota NU tempatnya hanya di surau saja dan bertabligh (Moh. Syafaat Mintaredja, 1976:29, E. Nugrobo, 1990:53).

Keadaan menjadi lebih buruk ketika konflik itu muncul dari anggota Masyumi itu sendiri. Konflik yang terjadi yaitu antara Masyumi kelompok Sukiman dan Masyumi kelompok Natsir. Hal ini tampak dalam kabinet Sukiman-Suwiryo dan kabinet Wi-

lopo (Bibit Suprpto, 1988:145). Masyumi kelompok Sukiman lebih dekat dengan golongan Nasionalis (PNI), sedangkan Masyumi kelompok Natsir lebih dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI)-nya Syahrir. Pertentangan prinsip antar pemimpin dalam satu tubuh partai ini sampai merembet keluar bahkan ke masyarakat luas, sehingga saling beroposisi, akibatnya organisasi yang menjadi korban (Bibit Suprpto, 1988:126).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa konflik politik dalam tubuh Masyumi akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pemilu 1955 sehingga mewarnai jalannya sistem pemerintahan di Indonesia. Dilihat dari konflik yang muncul terdapat suatu penyimpangan terhadap kepengurusan partai. Sebelum merdeka Masyumi didominasi oleh tokoh-tokoh Partai NU dan tokoh-tokoh Islam lain. Setelah kemerdekaan Partai Masyumi dikuasai oleh intelektual didikan barat non pesantren (Sukiman, Natsir) dan berusaha menggeser tokoh-tokoh keluaran pesantren seperti K.H Wahid Hasyim. Pada masa revolusi fisik Masyumi bisa bekerjasama dengan Partai Nasionalis dan Partai Sosialis, akan tetapi setelah penyerahan kedaulatan RI ketiga partai saling bersaing, hal ini akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pemilu 1955.

Dampak atau pengaruh yang terjadi akibat konflik politik Masyumi adalah penurunan jumlah suara dalam pemilu 1955. Terpisahnya NU dan PSII sebagai partai politik telah mengurangi jumlah suara yang seharusnya masuk dalam partai Masyumi. Penurunan jumlah suara ini disebabkan oleh dampak perpecahan antar tokoh Masyumi dalam satu partai sehingga kewibawaan tokoh menjadi berkurang. Berkurangnya kewibawaan ini menimbulkan pemikiran baru dikalangan rakyat bahwa persatuan umat Islam berkurang. Pada akhirnya, rakyat banyak beralih

ke partai yang lebih mengakar dikalangan bawah yaitu PNI. Dalam pemilu 1955 PNI unggul dalam perolehan suara, dan Masyumi menduduki posisi ke II dibawah PNI. Berdasarkan hasil pemilu itu, PNI sebagai partai yang terbanyak meraih suara, sekalipun mendapat jumlah kursi yang sama dengan Masyumi. PNI akhirnya ditunjuk Presiden Soekarno sebagai formatur kabinet pasca pemilu. Masalah inilah kiranya yang menarik untuk diteliti.

Disamping itu, penelitian ini dilakukan karena tema dan permasalahan ini belum pernah dibahas di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kecuali alasan tersebut di atas, perlu pula dikemukakan alasan lain yang melatarbelakangi penulisan ini. Sebagaimana dituturkan oleh Sutrisno Hadi, bahwa dalam memilih suatu topik penelitian sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Topik masih dalam jangkauan peneliti, 2. Tersedia secukupnya sumber bahan yang digunakan sebagai bahan acuan, 3. Topik cukup penting untuk diteliti, 4. Topik sangat menarik minat untuk diteliti (1986:51). Untuk meneliti peristiwa tersebut peneliti mampu mendapatkan sumber-sumber acuan yang mendukung penyelesaian penelitian tersebut. Juga ditinjau dari segi kemampuan ilmu, waktu, dan pembiayaan serta keediaan dari dosen pembimbing. Berdasarkan alasan-alasan di atas penulis memilih judul penelitian "Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyumi Terhadap Pelaksanaan Suara Hasil Pemilu 1955".

## 1.2 Penegasan Pengertian Judul

Dalam suatu penelitian, penegasan pengertian judul merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena sering terjadi salah pengertian antara penulis dengan pembaca.



Untuk mencegah terjadinya salah penafsiran ataupun kekaburan arti dari judul tersebut, maka sebelum melangkah lebih jauh, berikut ini penulis ketengahkan penegasan pengertian dari kata-kata atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1. Pengaruh
2. Konflik Politik
3. Masyumi
4. Pemilu 1955

#### 1.2.1 Pengaruh

Kata pengaruh menurut Lukman Ali diartikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang (1991:747). Sedangkan menurut Louis Gottschalk pengertian pengaruh adalah efek yang tegar dan membentuk terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif (1985:170). Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud pengaruh dalam penelitian ini adalah daya atau kekuatan dari luar tubuh Masyumi yang ikut membentuk watak, pikiran, dan perilaku anggota Masyumi dalam berpolitik dan bernegara.

#### 1.2.2 Konflik Politik

Kata konflik menurut Lukman Ali mempunyai pengertian perselisihan atau pertentangan (1991:518). Sedangkan politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo, yaitu suatu kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut pengambilan keputusan, kekuasaan, dan kewenangan (1977:8).

Adapun yang dimaksud dengan konflik politik dalam penelitian ini adalah perselisihan atau pertentangan dalam organisasi pada masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer untuk memperebutkan kekuasaan, yang ditandai dengan jatuh banggunya kabinet, sehingga banyak program kerja kabinet yang tidak terlaksana. Disamping itu juga ada persaingan politik antara partai yang ada. Mosi tidak percaya dari partai oposisi bisa menjatuhkan kabinet yang berkuasa.

### 1.2.3 Masyumi

Pengertian Masyumi menurut Saifudin Zuhri adalah sebuah badan federasi perjuangan umat Islam dibawah pimpinan K.H Hasyim As'ari (1981:37). Sedangkan menurut Syafii Maarif Masyumi diartikan sebagai kelanjutan dari MIAI yang mengkhususkan perjuangannya dibidang politik dalam rangka menegakkan ajaran Islam dalam wadah Indonesia Merdeka (1988:30). Selanjutnya E. Nugroho memberikan pengertian Masyumi adalah suatu partai politik di Indonesia yang berdiri tanggal 7 Nopember 1945 di Yogyskarta merupakan gabungan dari PSII, NU, Muhammadiyah (1990:53).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Masyumi dalam penelitian ini adalah suatu partai politik yang beranggotakan empat organisasi Islam di Indonesia yang mengkhususkan perjuangannya dibidang politik untuk menegakkan ajaran Islam.

### 1.2.4 Pemilu

Pengertian pemilu menurut Miriam Budiardjo adalah sarana untuk melaksanakan demokrasi dengan mengikut sertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya (1977:69-70). Sedangkan menurut Syafii Maarif Pemilu diarti-

kan sebagai suatu mekanisme politik interen dalam sistem demokrasi untuk memilih anggota DPR dari pusat sampai kabupaten, dan memilih anggota Majelis Konstituante (1988:40). Selanjutnya pendapat lain mengatakan bahwa pemilu diartikan sebagai tindakan melakukan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan oleh seluruh rakyat dalam suatu waktu tertentu dan menurut cara tertentu (C.S.T Kansil, 1970:24).

Berpedoman pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pemilu dalam penelitian ini adalah suatu mekanisme politik untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari pusat sampai daerah dalam waktu dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu daya atau kekuatan dari luar Masyumi yang menyebabkan perselisihan atau pertentangan dalam tubuh Masyumi menjelang pelaksanaan pemilu 1955.

### 1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

#### 1.3.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan sangat diperlukan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran penelitian yang sangat tepat. Untuk itu dalam setiap penelitian sangat diperlukan adanya ruang lingkup pembahasan. Dalam hal ini Sutrisno Hadi menyebutkan :

"Sekali suatu persoalan telah ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyelidik sendiri penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya" (1986:8).

Sesuai dengan pendapat tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan penegasan pengertian judul di atas, maka ditinjau dari segi wilayah, konflik politik dalam tubuh Masyumi ini secara resmi terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta. Hal ini dikarenakan dengan berpindahya ibu kota negara kosatuan dari Yogyakarta ke Jakarta, maka pimpinan pusat partai dipindahkan juga ke Jakarta (Rusli Karim, 1983:66). Ditinjau dari segi waktu, penulis membatasi bahasan ini dari tahun 1945 sampai tahun 1955. Namun mengenai angka tahun tersebut bukan merupakan batasan yang mutlak. Hal ini dikarenakan di sana-sini penulis juga akan menyinggung tahun sebelum 1945 sebagai awal dari penulisan skripsi ini. Sedangkan tahun 1955 yaitu dilaksanakannya Pemilihan Umum pada masa kabinet Burhanuddin Harahap yang biasa disebut sebagai kabinet Masyumi (Rusli Karim, 1983:119).

Hal lain, agar pembicaraan lebih terarah, maka perlu penulis tegaskan pula tentang inti pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi terhadap pelaksanaan pemilu 1955 pada masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Dengan batasan materi tersebut penulis dapat merumuskan permasalahan penelitian seperti dibawah ini.

### 1.3.2 Rumusan Permasalahan

Setiap pelaksanaan penelitian selalu bertitik tolak dari permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan rumusan permasalahan penelitian yang pada hakikatnya adalah generalisasi ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi dan analisis variabel yang tercakup didalamnya (Mohammad Ali, 1983:36).



Bertolak dari uraian di atas, dalam penelitian ini rumusan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi terhadap perolehan suara hasil pemilu 1955 ?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Suatu aktivitas penelitian sudah barang tentu mempunyai tujuan. Begitupula dengan penelitian sejarah yang penulis lakukan ini. Dengan berpedoman pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ingin mengungkap secara jelas dan mendalam mengenai pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi terhadap perolehan suara hasil pemilu 1955.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu sejarah;
- 2) bagi calon guru Sejarah, penelitian ini dapat membantu memenuhi salah satu kompetensi guru terutama aspek penguasaan materi;
- 3) bagi staf pustakawan, hasil penelitian ini dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa atau peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis dengan lebih mendalam dalam rangka pelaksanaan dharma penelitian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, selanjutnya hasil penelitian ini akan menambab khazanah kepustakaan Universitas Jember;
- 4) bagi peneliti-peneliti sejarah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lain secara lebih mendalam.

## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

### 2.1 Latar Belakang Berdirinya Partai Masyumi

Masyumi adalah organisasi sosial keagamaan yang telah ada sejak masa pendudukan Jepang. Setelah itu berubah menjadi organisasi sosial politik atau partai politik. Berdasarkan hasil Muktamar Islam Indonesia, Muktamar diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 7 Nopember 1945. Pada mulanya semua jenis kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta. Berpindahnya Ibu kota negara kesatuan dari Yogyakarta ke Jakarta, menyebabkan pimpinan pusat partai pindah. Sehingga semua aktivitas berlangsung di Jakarta (Harun Nasution, 1992:626).

Munculnya Masyumi sebagai partai politik tidak terlepas dari keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang berdirinya partai-partai politik. Dengan berdirinya banyak partai ini akan mengarah pada sistem parlementarisme. Partai-partai itu akan menuntut hak asasinya dalam negara demokrasi untuk ambil bagian dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) maupun dalam kabinet. Sejak saat itu Masyumi aktif sebagai partai politik, dan sebagai landasannya adalah Islam. Dellar Noer mengatakan bahwa Masyumi bermaksud memperkuat dan menyempurnakan dasar-dasar pada UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan suatu masyarakat dan negara Islam (1987:119).

Mengenai struktur kepengurusan dalam Masyumi terdapat istilah Majelis Syuro dan Pengurus Besar. Majelis Syuro adalah wadah untuk menilai perjuangan partai dari sudut akidah Islam, yaitu apakah perjuangan partai menyimpang dari hukum Islam atau tidak. Bila tindakan partai dinilai tidak

menyimpang dari hukum Islam maka boleh diteruskan, tetapi bila partai dinilai melanggar hukum Islam tindakan partai tidak boleh dijalankan. Pengurus besar bertugas memandang gerak dan perjuangan Masyumi dari sudut politis. Pengurus Masyumi periode awal itu terdiri dari Majelis Syuro yang diketuai oleh K.H Hasyim Asy'ari, dan Pengurus Besar (Badan Eksekutif) yang diketuai oleh Soekiman Wirjosandjojo. Mohammad Natsir sendiri pada periode awal ini kedudukannya sebagai anggota Pengurus Besar (E. Nugroho, 1990:53).

Selanjutnya mengenai struktur partai dalam pelaksanaannya terdapat dualisme kekuasaan. Dualisme tersebut yaitu mengenai struktur keanggotaan dan struktur kepemimpinan. Struktur keanggotaan Masyumi terdiri dari anggota perseorangan (biasa) dan anggota organisasi (anggota Istimewa). Anggota perseorangan mempunyai syarat usia minimal 18 tahun dan tidak terikat oleh anggota partai lain, dalam artian tidak dibenarkan menjadi anggota suatu partai. Anggota organisasi terdiri dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam dan PSII. Anggota organisasi mempunyai hak untuk memberikan nasihat atau pandangan, hal ini akan mengarah pada dualisme kepemimpinan yaitu antara pengurus besar dengan Majelis Syuro. Kedudukan Majelis Syuro yang hanya sebagai dewan penasihat saja dirasa sangat menjenuhkan, oleh sebab itu menginginkan kekuasaan politik, sedangkan pengurus besar mempunyai kekuasaan politik yang dominan. Pada akhirnya hubungan antara pimpinan pusat partai dengan Majelis Syuro terjadi kerenggangan. Perbedaan pendapat serta latar belakang sub-kultural keagamaan yang menyebabkan renggang (Harun Nasution, 1992:627, Deliar Noer, 1987:61).

Kerenggangan hubungan ini dikatakan oleh Syafii Maarif yang mengutip pendapat A.R Basweden sebagai berikut :

"Kekuatan dan kelemahan Masyumi justru tampaknya terletak pada sifatnya yang federatif. Dengan bentuk federatif, Masyumi telah berhasil menarik hampir semua organisasi Islam di Indonesia. Kelemahan Masyumi terletak pada semangat golongan yang seringkali lebih dominan dalam partai daripada semangat persatuan" (1988:32).

Adanya semangat golongan yang lebih tinggi ini mempersulit Masyumi dalam menyusun suatu badan eksekutif yang kuat dan handal. Kegagalan menyalurkan semangat heterogen ini akan membawa partai pada masalah intern.

Konflik antar golongan tidak akan terjadi bila semua pihak kembali pada tuntunan agama Islam. Semua persoalan politik harus dimusyawarahkan dan tidak boleh menyimpang dari tuntunan agama Islam atau tidak menghalalkan segala cara. Unsur ulama tetap merupakan unsur tertinggi. Oleh sebab itu untuk menjaga keutuhan partai adalah menetapkan kedudukan ulama. Para ulama ditempatkan sebagai Majelis Syuro yang berfungsi untuk menilai perjuangan partai Masyumi dari sudut aqidah Islam agar tidak menyimpang dari hukum-hukum Islam (Maksoem Machfoedz, 1982:79).

Beberapa Ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh para tokoh Masyumi yang tidak dimiliki tokoh lainnya adalah kejujuran atau integritas, watak demokratik, dan moral kehidupan yang luhur. Masyumi tetap mempertahankan kemurnian cita-cita kemerdekaan, hal ini dibuktikan oleh sikapnya yang menolak perjanjian-perjanjian dengan Belanda yang dinilai menodai perjuangan bangsa. Ciri atau karakteristik ini sangat berbeda dengan tokoh golongan Kiri (PKI, Partai Sosialis, Pesindo, dan Partai Buruh). Perjanjian Linggarjati (1946) dan Renville (1947) adalah buatan golongan kiri. Watak



demokratik dalam tokoh Masyumi tercermin dalam cita-cita perjuangannya yaitu membentuk negara demokrasi dengan jalan musyawarah. Islam tidak menyukai adanya diktator dan fasisme dalam suatu negara. Setelah merdeka belum pernah ada yang bisa membuktikan adanya tokoh Masyumi yang korupsi. Bila ada kelompok politik yang sejak dini melihat bahaya PKI terhadap negara, kelompok itu adalah tokoh-tokoh Masyumi. Mohammad Natsir, Soekiman Wirjosandjojo, dan Burhanuddin Harahap adalah tiga orang pemimpin Masyumi yang pernah memegang kendali pemerintah RI sebagai Perdana Menteri pada dasa warsa 1950-an. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, seperti Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Yusuf Wibisono, Fekih Usman, Kasman Singodimejo, pernah memegang kunci pemerintahan RI (Amir Hamzah Wirjosukarto, 1984:vii-ix, Syafii Maarif, 1988:33).

Tujuan jangka panjang Masyumi yang hendak diraih, telah tercantum dalam anggaran dasarnya. Tujuan tersebut adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam didalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Illahi. Tujuan ini lebih jauh dijabarkan oleh Sya-fii Maarif sebagai berikut :

"Kita menuju Baldatun thoyibatun, wa rabbun ghofur, negara yang berkeadilan diliputi keampunan Illahi, di mana negara melakukan kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang di pilih" (1998:113).

Dengan rumusan tujuan ini, Masyumi melalui cara-cara dan saluran-saluran demokratis ingin menciptakan negara Indonesia yang bercorak Islam. Paham keagamaan yang dianut anggota Masyumi adalah reformis yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh. Jika dilihat dari perkembangannya, maka sampai tanggal 31 Desember 1950 di tiap-tiap Kabupaten

terdapat cabangnya, hampir di tiap Kecamatan ada anak cabang dan hampir tiap-tiap desa di Jawa terdapat rantingnya. Sambil memperluas pembentukan di desa-desa di luar Jawa telah tercatat 237 cabang, 1080 anak cabang dengan 4982 ranting dengan lebih kurang 10.000.000 anggota. Dari sini terlihat Masyumi mengalami perkembangan yang pesat (Rusli Karim, 1983:70).

Pada masa demokrasi Liberal Masyumi menempatkan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri I, berdasarkan mosi integral pada tahun 1950. Mosi integral yang dimaksud adalah usaha Natsir dalam mempersatukan negara-negara bagian untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia di Yogyakarta (Eric Samola, 1989:62).

Keberhasilan Natsir tidak berjalan lama, karena dijatuhkan oleh teman separtainya yaitu Soekiman Wirjosandjojo. Meskipun keduanya saling bersaing, mereka tidak pernah bertabrakan secara terbuka. Masing-masing menganut prinsip berbeda dalam persatuan. Karena sama-sama terikat dengan prinsip demokrasi, atau dalam istilah agama disebut prinsip Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam). Inilah yang menyebabkan kedua tokoh tersebut membela Masyumi sampai saat partai ini disuruh bubar oleh Sukarno pada akhir 1960 (Syafii Maarif, 1988:34).

## 2.2 Kondisi Sosial Politik di Indonesia Tahun 1945-1955

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Negara yang baru merdeka banyak mengalami tantangan. Tantangan tersebut berasal dari dalam dan luar. Belanda sebagai bekas penjajah Indonesia banyak menyebarkan isu-isu. Isu Belanda diantaranya adalah Indonesia buatan Jepang. Munculnya isu-isu terse-

but mendorong keluarnya Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Keluarnya Maklumat berarti KNIP bukan hanya sebagai pembantu Presiden, tapi bertugas sebagai MPR dan DPR sebelum lembaga legeslatif terbentuk. Kabinet pertama terbentuk dengan anggota campuran atau tidak mewakili salah satu partai. Satu-satunya partai yang ada hanya Masyumi yang terbentuk sejak jaman Jepang (Bibit Suprpto, 1988:20).

Keluarnya Maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 telah merubah sistem pemerintahan dari sistem presidentil menjadi sistem parlementer. Sistem parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Karena sistem ini memberi peluang dominasi partai-partai politik dalam DPR. Partai yang muncul pada setiap kabinet, berdasarkan koalisi yang terdiri dari satu atau dua partai besar ditambah beberapa partai kecil. Koalisi tidak segan-segan menarik dukungannya sehingga kabinet seringkali jatuh. Umumnya kabinet masa pra pemilu tidak dapat bertahan lama. Hal inilah yang menghambat perkembangan ekonomi dan politik, karena pemerintah tidak dapat melaksanakan programnya (Miriam Budiardjo, 1977:70).

Pada periode parlemen ini, rasa tidak senang terhadap partai-partai politik dan selalu bersaing mulai timbul. Pada tahun 1953 kampanye mulai tegang dalam menghadapi pemilu 1955. Kampanye ini menjadi ajang kampanye ideologi bagi setiap partai. Munculnya beberapa aliran diantaranya adalah Islam, nasionalis, dan komunis/sosialis menunjukkan kekuatan politik saling bersaing. adapun teknik-teknik yang digunakan oleh partai-partai politik dalam menarik dukungan massa menempuh cara-cara sebagai berikut; 1) mengadakan rapat raksasa, 2) mengadakan ceramah, 3) mengadakan rapat kerja,

4) kunjungan ke rumah-rumah. Untuk dapat melakukan cara-cara tersebut sangat dibutuhkan keahlian mengorganisasi para pemimpin partai. Proses perpecahan ideologis pada waktu itu memuncak, ditandai dengan kampanye besar besaran dua tahun menjelang pemilu 1955. Saat itu dapat dipandang sebagai periode kegiatan organisasi yang ramai (Herbert Feith dan Lance Castles, 1988:42).

Kegiatan partai-partai untuk berkampanye dan meluaskan pengaruhnya makin dipusatkan di daerah-daerah. Tema yang diperdebatkan sesungguhnya berkisar pada perdebatan antara PNI dan Masyumi. Golongan nasionalis yang dipersonifikasikan dengan Sukarno Hatta dikenal sebagai rival utama golongan Islam. Dilihat dari pengikutnya tak berlebihan jika disebut sebagai runner up setelah golongan Islam (Rusli Karim, 1983:55).

Kondisi politik di dalam negeri belum stabil pada periode ini. Pemberontakan bermunculan, diantaranya terjadi pemberontakan di Kalimantan Selatan tanggal 10 Oktober 1950 yang dipimpin Ibnu Hajar. Masalah pengembalian Irian Barat juga mengalami jalan buntu. Mundurnya beberapa menteri dalam suatu kabinet menunjukkan keretakan dalam tubuh kabinet. Perangkapan jabatan yaitu Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan menyebabkan kelemahan kabinet. Masa menjelang pemilu 1955 menjadi ajang kampanye ideologi. Semua terpusat pada masalah dasar negara, apakah memasukkan sila ketuhanan Yang Maha Esa ataukah berdasarkan Islam. Rasa khawatir ini akan merusak kesatuan nasional (Herbert Feith dan Lance Castles, 1988:43).

### 2.3 Pengaruh Konflik Politik Dalam Tubuh Masyumi Terhadap Pemilu 1955

Lewat mosi integral Muhammad Natsir tahun 1950 dibentuklah negara kesatuan Republik Indonesia di bawah UUDS 1950. Kedudukan Presiden menurut UUDS 1950 ini adalah kepala negara simbol yang tidak memimpin secara langsung. Sebagai kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri I pada awal demokrasi parlementer adalah Mohammad Natsir dari Masyumi. Kabinet pada masa ini kurang mendapat dukungan rakyat, karena merupakan kabinet koalisi bukan kabinet nasional. Natsir tidak mau bekerjasama dengan PNI yang mempunyai akar kuat dikalangan rakyat. Disamping itu, Natsir banyak memojokkan NU yang intinya Kiai tidak usah mengurus politik, lebih baik mengurus pesantren. Akhirnya NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai baru yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Kabinet Natsir ini jatuh oleh Mosi tidak percaya S. Hadikusumo dari PNI (Syafii Maarif, 1988:38).

Pengganti Natsir adalah Soekiman Wirjosandjojo (Masyumi). komposisi kabinet pada masa ini banyak didominasi kelompok Soekiman dan PNI. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi, tidak semua partai tercakup didalamnya. Program kabinet pada masa ini adalah melaksanakan pemilu seperti halnya program kabinet sebelumnya pada masa Natsir. Program pemilu belum dapat dilaksanakan, karena dalam tubuh partai terdapat perpecahan dan keretakan. Perpecahan tersebut antara kelompok Natsir dan Soekiman dalam partai Masyumi. Soekiman menganggap Natsir adalah seorang radikal karena dekat dengan Syahrir yang menganut paham sosialis. Adanya pemikiran yang berbeda ini menimbulkan keretakan dalam tubuh Masyumi (Bibit Suprpto, 1988:139). Jatuh banggunya kabinet pada masa parlementer ini selain dari dalam tubuh partai

juga dari luar yaitu kaum kolonialis dan imperialis yang berusaha memecah belah kekuatan politik, munculnya beberapa pemberontakan yang merintang jalannya kabinet dan adanya Partai Oposisi (Bibit Suprpto, 1988:139, Moh. Syafaat Mintaredja, 1988:18).

Perpecahan Masyumi lebih rumit lagi setelah perbedaan kepentingan pribadi dari para tokoh Masyumi masuk dalam tubuh partai. Dalam kaitannya dengan konflik yang muncul dalam tubuh partai Masyumi, Fuad Aseyari mengatakan bahwa ada tiga penyebab utama perpecahan Masyumi di Indonesia, yaitu : 1) adanya perbedaan paham mengenai acuan Islam terutama berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ibadah, 2) adanya perbedaan visi politik, 3) adanya interes pribadi yang terselu-bung dalam aktivitas dakwah Islamiah (tth :21).

Adanya perpecahan pada masa kabinet Natsir dan Soekiman akan mempengaruhi pelaksanaan pemilu 1955, karena Masyumi di pandang sebagai wakil dari Umat Islam dalam berpolitik. Rakyat Indonesia mayoritas beragama Islam, hampir 90% tetapi minoritas dalam berpolitik, hal ini dikarenakan upaya untuk mempersatukan umat Islam dalam satu partai politik tunggal yaitu Masyumi mengalami kesulitan. Antara umat Islam pesantren dan non pesantren mempunyai kebijaksanaan politik sendiri sesuai dengan kondisi politik yang ada (Moh. Syafaat Mintaredja, 1988:25).

Akibat dari konflik politik di atas maka program kerja kabinet yaitu mempersiapkan pemilihan umum 1955 untuk membentuk konstituante selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini bukan berarti Kabinet Natsir dan Sukiman belum mampu membust program akan tetapi karena kondisi politik yang belum stabil. Baru pada kepemimpinan Burhanuddin Harahap dari

Masyumi pelaksanaan pemilu bisa berjalan, dan sebagai kabinatnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Hasil Pemilu yang pertama ini Masyumi mendapat 57 kursi, PHI 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi. Pada pemilu pertama ini berhasil mendudukkan empat partai besar dengan memperoleh 78% dari suara yang sah dan jumlah kursi sebanyak 198 buah (77,3%). Meskipun demikian Masyumi harus menghadapi konflik dari PKI yang pada akhirnya menyebabkan Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno tahun 1960. Namun sebelumnya tanggal 8 September 1959 pimpinan Masyumi telah memutuskan hubungan dengan seluruh anggota istimewanya (Rusli Karim, 1983:121, Harun Nasution, 1992:628).

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus mempunyai pegangan yang kuat untuk membuktikan kebenarannya. Dasar pegangan yang dimaksud adalah hipotesis. Menurut Suharsimi Arikunto hipotesis berasal dari kata hypo yang artinya dibawah dan thesa yang berarti kebenaran. Jadi pengertian hipotesis adalah teori sementara yang kebenarannya masih harus diuji (dibawah kebenaran) (1992:32). Pengertian hipotesis menurut Winarno Surakhmad adalah sebuah kesimpulan yang masih harus dibuktikan kebenarannya (1990:68). Selanjutnya Sutrisno Hadi memberikan pengertian hipotesis sebagai konklusi yang sifatnya sementara (1990:63).

Dari beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara dari suatu penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Sehubungan dengan pengertian di atas, dan berdasarkan permasalahan dan tinjauan kepustakaan di atas,

maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi ialah kekuatan Masyumi menjadi terpecah belah menjelang Pemilu 1955. Sehingga dalam Pemilu 1955 perolehan suara Masyumi menjadi berkurang. Sebelumnya jumlah anggota DPR di tahun 1954 adalah: Partai Masyumi 44 orang, PNI 42 orang, PKI 17 orang, dan NU delapan (8) orang dan PSII empat (4) orang. Setelah Pemilu 1955 hasil perolehan suara adalah Masyumi 57 kursi, PNI 57 kursi, PKI 39 kursi, NU 45 kursi, PSII delapan (8) kursi. Meskipun Masyumi dan PNI mempunyai jumlah suara yang sama, namun PNI unggul dalam perolehan suara di Indonesia.





### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pengertian Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan suatu metode sangat diperlukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya cara atau jalan. Secara ilmiah metode menyangkut masalah cara kerja. Menurut Winsarno Surakhsad metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (1990:131). Sedangkan menurut Mardalis metode diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian (1990:24).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian untuk mencapai tujuan.

Pengertian penelitian yang biasa disebut *research* adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1986:4). Sedangkan menurut Mardalis, penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran (1990:24). Penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemecahan masalah yang terorganisir menurut langkah-langkah tertentu.

Dari batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Pengertian metode penelitian menurut Kartini Kartono adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan penelitian (1990:20). Lebih lanjut Moh. Nazir menyatakan bahwa metode penelitian sebagai pemandu peneliti tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan serta alat-alat apa yang akan digunakan (1988:85).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau tehnik yang dilakukan dengan hati-hati dan sempurna guna menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah.

Metode penelitian menurut Winarno Surakhmad diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu : 1) metode penelitian historik, 2) metode penelitian eksperimen, 3) metode penelitian deskriptif (1990:29). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah (historical research method). Metode penelitian Historik menurut Moh Nazir ada empat yaitu : 1) penelitian sejarah komparatif, 2) penelitian yuridis atau legal, 3) penelitian biografis, 4) penelitian bibliografis (1985:61).

Dari ke empat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bibliografis, menurut Hadari Nawawi disebut penelitian kepustakaan (1991:82). Penelitian ini dalam bahasa Inggris disebut Library Research artinya penelitian dengan menggunakan sumber-sumber buku atau yang lain yang terdapat dalam perpustakaan (Library). Jadi literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku saja, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan tertulis lainnya (Hadari Nawawi, 1991:30). Penelitian ini dapat pula disebut studi Literer. Dalam

penelitian ini penulis menghimpun karya-karya tertentu disamping memberikan kritik dan interpretasi serta generalisasi yang mampu dipertanggung jawabkan.

### 3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Pengertian metode penelitian sejarah menurut Winarno Surakhmad adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historik (sejarah) suatu masalah (1982:132). Dalam hal ini pemecahan yang ilmiah dan perspektif adalah mengkaji secara logis terhadap peristiwa-peristiwa setelah suatu peristiwa terjadi. Sedangkan menurut Louis Gottschalk memberikan pengertian metode sejarah sebagai berikut :

"Yang dinamakan metode sejarah disini adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah)" (1986:32).

Disamping itu Nugroho Notosusanto juga mengutip pendapat Gilbert J. Garraghan yang memberikan pengertian metode sejarah sebagai berikut :

"Historical method is a systematic body of principles and rules designed to aids effectively in gathering the source materials of history, appraising them critically, and prenting a synthesis (generally in written form) of the result achieved".

"Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tulisan)" (1984:10-11).

Sementara itu Moh. Nazir menjelaskan bahwa metode penelitian sejarah adalah sebagai penyelidikan kritis dan ha-ti-hati terhadap pengadaaan dan pengalaman-pengalaman masa lampau serta pengembangannya dan menimbang secara cukup teliti keterangan yang diperoleh sekaligus diinterpretasikan (1988:54-55). Sejalan dengan pendapat di atas, Tatang M. Amirin menjelaskan bahwa penelitian historik merupakan kajian logik terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dengan mendasarkan diri pada gambaran tertulis maupun lisan (1990:110).

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah suatu prosedur cara kerja peneliti sejarah dalam melakukan rekonstruksi secara obyektif tentang masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau itu.

Adapun prosedur cara kerja sejarawan menurut Nugroho Notosusanto dapat dikelompokkan menjadi empat kegiatan yaitu : 1) heuristik; 2) kritik; 3) interpretasi; 4) historiografi (1971:17).

### 3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan tahap awal dalam melakukan suatu penelitian. Menurut Nugroho Notosusanto kata heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskein yang berarti menemukan sumber-sumber (1971:18). Senada dengan pendapat tersebut, menurut Soeri Soeroto adalah menemuken isi sumber itu (1980:5). Sedangkan menurut I.G Widja, heuristik adalah mencari atau menemukan sumber-sumber sejarah (1988:19). Selanjutnya Sutrasno memberikan pengertian Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau sumber-sumber sejarah yang akan digunakan untuk penulisan sejarah

atau mencari sesuatu yang digunakan untuk menceritakan kembali peristiwa sejarah (1975:45). Berdasarkan pendapat di atas, heuristik adalah suatu proses pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang berupa jejak-jejak masa lampau untuk diproses menjadi fakta-fakta. Sumber sejarah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 1) sumber benda (bangunan, senjata, perkakas); 2) sumber tertulis (dokumen); 3) sumber lisan (hasil wawancara) (Soeri Soeroto, 1980:5; Nugroho Notosusanto, 1971:18).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber tertulis yang berupa buku-buku sumber dan memuat pendapat-pendapat para ahli sejarah. Adapun sumber tertulis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seseorang saksi dengan mata kepala sendiri. Sedangkan sumber sekunder ialah kesaksian dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang diisahkan dan orang tersebut memperoleh sumber dari orang lain (Louis Gottschalk, 1986:35).

Dari kedua sumber tersebut penulis banyak menggunakan sumber sekunder, karena mudah di dapat dan memberikan informasi serta data yang telah di salin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber aslinya (Kartini Kartono, 1990:73). Sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu: 1) sumber pokok ; 2) sumber penunjang. Penulis menggunakan sumber pokok dan sumber penunjang sebagai sumber acuan. Sumber pokok adalah sumber yang banyak dipakai atau menjadi acuan pokok dalam memecahkan masalah yang dibahas. Sedangkan sumber penunjang adalah sumber tambahan yang menunjang sumber pokok. Peneliti dalam hal ini banyak menggunakan sumber sekunder atau sumber penunjang karena sulitnya dalam mencari sumber pokok.

### 3.2.2 Kritik

Kritik merupakan langkah berikutnya setelah peneliti berhasil menemukan atau mengumpulkan jejak-jejak sejarah yang akan menjadi sumber sejarah. Tahap kritik adalah tahap memilah-milah dan mengkaji sumber-sumber yang telah diperoleh, sumber tersebut benar asli dan dapat dipercaya atau tidak (Winarno Surakhmad, 1985:135). Pengujian sumber sejarah dimaksudkan agar didapat fakta-fakta sejarah, karena sumber tersebut masih merupakan bahan-bahan mentah belaka untuk disusun menjadi fakta sejarah (Nugroho Notokusanto, 1971:41). Fakta sejarah adalah suatu unsur yang dijabarkan secara langsung dokumen-dokumen sejarah dan dianggap kredibel setelah melalui pengujian yang seksama sesuai dengan ketentuan metode sejarah (Louis Gottschalk, 1986:96).

Kritik sumber sejarah mempunyai dua fase yaitu : 1) kritik ekstern yaitu kritik yang dilakukan untuk mengetahui apakah sumber itu asli atau tiruan; 2) kritik intern yaitu kritik yang dilakukan untuk meneliti kebenaran isi sumber itu (Winarno Surakhmad, 1990:35). Jadi kritik ekstern berkaitan dengan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan dan kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang yang diberikan oleh sumber itu memang dapat dipercaya, buktinya dapat diperoleh dengan cara: 1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; 2) membandingkan kesaksian daripada pelbagai sumber (Nugroho Notokusanto, 1971:21).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah kritik adalah kegiatan menilai, menguji atau menyeleksi sumber sejarah sebagai usaha mendapatkan jejak atau sumber yang benar, autentik, asli, dan keutuhan suatu sumber informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.2.3 Interpretasi

Interpretasi merupakan langkah ke tiga dari metode sejarah, interpretasi bisa juga disebut penafsiran. Pengertian interpretasi menurut Nugroho Notosusanto adalah menetapkan makna dan saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah dihimpun. Berbagai fakta yang lepas satu sama lain yang harus dirangkai dan dihubungkan-hubungkan hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan logis (1971:17-23). Sedangkan I.G. Widja mengatakan bahwa fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan itu perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain se-demikian rupa, sehingga fakta yang satu dengan fakta yang lainnya merupakan rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kesesuaian (1983:23). Dengan demikian rangkaian fakta-fakta itu harus menunjukkan rangkaian yang bermakna dari gejala-gejala, peristiwa atau gagasan yang ditulis di-masa lampau dalam arti tersusun secara sistematis, kronologis dan logis. Jadi Interpretasi adalah kegiatan untuk merangkai, menghubungkan-hubungkan dan mengaitkan fakta-fakta sejarah, sehingga bisa mengungkapkan kehidupan masyarakat masa lampau dengan aktivitasnya secara aktual, rasional dan kronologis.

### 3.2.4 Penyajian

Penyajian merupakan klimaks daripada penelitian sejarah dan merupakan langkah terakhir dari metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, penyajian adalah usaha mengkonstruksi yang imajinatif dari masa lampau atau usaha menginterpretasikan fakta menjadi kisah (1983:33). Kegiatan penulisan sejarah menjadi kisah sejarah ini merupakan hasil interpretasi dari fakta-fakta sejarah. Penyajian tersebut dalam bentuk tertu-

lis dengan jalan merangkaikan fakta-fakta sejarah secara logis, kronologis dan sistematis. Metode yang penulis gunakan dalam penyajian penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta sebagaimana adanya dengan penekanan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki (Hadari Nawawi, 1981:63). Lebih lanjut Moh. Nazir mengatakan, bahwa metode deskriptif bukan saja memberikan gambaran terhadap suatu fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, membuat prediksi serta mendapat makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan (1965:64).

Jadi historiografi dengan metode deskriptif yang penulis maksudkan adalah suatu usaha untuk melukiskan peristiwa secara kronologis, logis dan sistematis dengan merangkaikan fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta-fakta tersebut, sehingga terwujud kisah sejarah yang bersifat ilmiah.

### 3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan, untuk itu tempat penelitiannya adalah perpustakaan-perpustakaan. Untuk menentukan tempat penelitian penulis menggunakan metode Purposive Sampling yaitu dalam mengambil sampel atau pemilihan kelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Sutrisno Hadi, 1989:82).

Dengan metode tersebut, penulis menentukan dengan sengaja didasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang penulis ketahui melalui informasi yang mendahului (previous knowledge) dan secara internasional hanya mengambil beberapa



perpustakaan tertentu yang penulis pastikan terdapat buku-buku yang penulis perlukan. Dengan demikian penentuan perpustakaan sebagai tempat penelitian berdasarkan informasi sebelumnya bahwa tempat-tempat tersebut menyediakan sumber-sumber yang dapat memecahkan permasalahan dan membuktikan hipotesis yang telah penulis ajukan sebelumnya. Sebagai populasi penelitian, di Kotatiff Jember banyak terdapat perpustakaan-perpustakaan diantaranya ialah Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Perpustakaan Daerah Kabupaten Jember, dan Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember.

Adapun perpustakaan yang penulis jadikan tempat penelitian adalah : 1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember; 2) Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember; dan Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember. Disamping itu penulis juga menggunakan buku-buku koleksi pribadi.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dengan studi kepustakaan, data mempunyai arti kumpulan pendapat-pendapat para ahli sejarah mengenai fakta suatu sejarah. Penulis dalam hal ini menggunakan metode dokumenter. Adapun yang dimaksud metode dokumenter menurut Suharsimi Arikunto adalah metode penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai datanya (1992:189). Selanjutnya Hadari Nawawi mengatakan bahwa metode dokumenter adalah cara pengumpulan data dari peninggalan tertulis terutama berupa arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat-pendapat dan teori-teori, hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian (1991:133).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang menggunakan sumber data berupa buku-buku dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam suatu penulisan sejarah sumber primer lebih tinggi mutunya daripada sumber sekunder. Namun apabila sumber primer itu tidak ada, dapat menggunakan sumber sekunder, hal ini sesuai dengan pendapat Winarno Surakmad, bahwa sumber sekunder dapat dipakai apabila sumber primer tidak dapat diperoleh (1990:125). Sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi dokumenter yang bersifat sekunder, berfungsi memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya (Kartini Kartono, 1991:73). Meskipun bersifat sekunder dalam pemakaiannya telah diseleksi dan diuji kebenarannya.

### 3.5 Metode Analisis Data

Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah menganalisis data. Maksud dari menganalisis data adalah usaha untuk mengumpulkan kembali, merangkaikan dan menghubungkan fakta data yang bercecerai berai untuk diinterpretasikan kembali sehingga menghasilkan kisah sejarah dalam bentuk tertulis. Langkah menganalisis data dalam penelitian ini berkaitan dengan kritik dan interpretasi.

Metode yang penulis pakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode filosofik dengan tehnik komparatif dan induktif. Hadari Nawawi dalam mengatakan bahwa metode filosofik adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berfikir yang induktif dan dengan memperhatikan hukum-hukum

berfikir yang logis (1991:62). Metode filosofik ini bekerja dengan menggunakan data kualitatif, sehingga dalam pemecahan masalah atau pengujian hipotesisnya pada umumnya bersifat apriori artinya berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh akal.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud metode filosofik dalam penelitian ini adalah cara atau tehnik yang digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan secara rasional dengan menggunakan cara berfikir yang terarah menurut peraturan-peraturan yang tepat untuk mencapai suatu kebenaran. Dalam menerapkan metode filosofik ini, penulis menggunakan tehnik komparatif dan induktif.

### 3.5.1 Logika Komparatif

Tehnik komparatif adalah cara membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai sumber dan pendapat untuk mencari data dan fakta atau situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu (Moh. Ali, 1985:125). Sedangkan Winarno Surakhmad mengatakan bahwa studi komparatif digunakan dalam sejarah untuk meneliti perhubungan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan suatu peristiwa (1982:36).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa tehnik komparatif adalah cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa, hubungan satu fenomena yang lain dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan untuk mendapatkan fakta dari suatu peristiwa sejarah yang bisa dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang masuk akal.

Dalam menganalisis data sejarah, teknik komparatif digunakan untuk membanding-bandingkan data yang satu dengan yang lain untuk mendapat fakta sejarah yang bisa dirangkai-kan, sehingga menjadi suatu kisah sejarah.

### 3.5.2 Logika Induktif

Pengertian induktif adalah proses pemikiran dari pengetahuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang lebih konkrit dan khusus disimpulkan menjadi pengetahuan yang umum (W. Poespoprodjo dan T. Gilareso, 1989:15). Menurut Sutrisno Hadi pengertian induktif adalah cara berfikir sintetik berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, fakta-fakta yang unik dan merangkai-kan fakta-fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum (1986 :18). Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat memberikan pengertian teknik induktif yaitu suatu teknik yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan atau konkulasi yang bersifat umum dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan analisis data menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dipakai peneliti dalam memecahkan masalah yang diselidiki secara rasional dan terarah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dari pelbagai fenomena dan informasi atau data yang satu dengan lainnya, kemudian ditarik kesimpulan dari soal-soal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum, sehingga menghasilkan analisis yang logis, kronologis dan sistematis yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

RAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

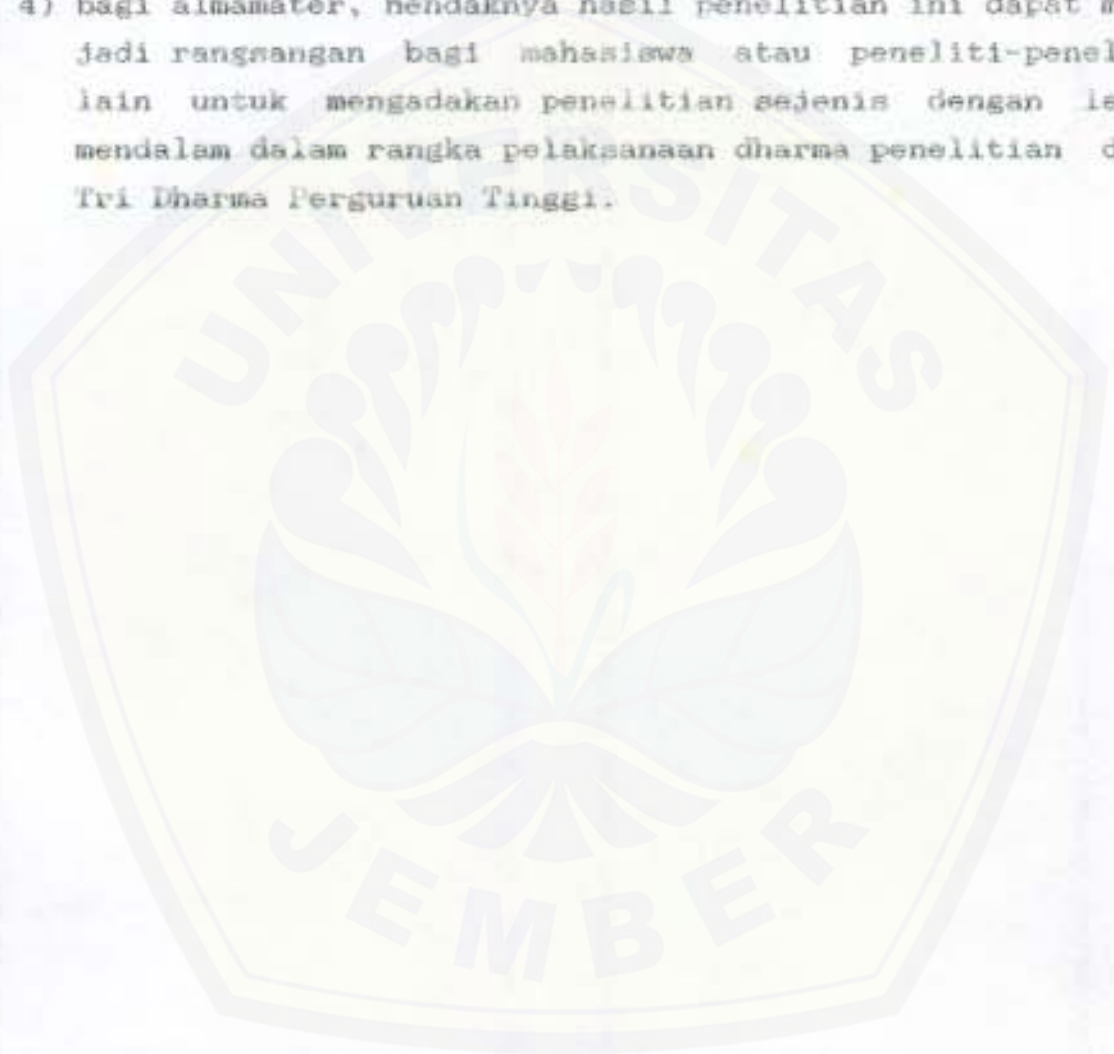
Berdasarkan permasalahan, tinjauan kepustakaan, dan pembahasan, kesimpulan hasil penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : pengaruh konflik politik alam tubuh masyarakat terhadap perolehan suara hasil ialah kekuatan Masyarakat menjadi terpecah belah menjelang Pemilu 1955. Sehingga dalam Pemilu 1955 perolehan suara Masyarakat menjadi berkurang. Komposisi jumlah anggota DPR sebelumnya di tahun 1954 adalah : Masyarakat sebanyak 44 orang, PNI 43 orang, PKI 17 orang, NU 3 (delapan) orang, dan PSII 4 (empat) orang. Setelah pemilu 1955 hasilnya Masyarakat mendapat 57 kursi, PNI 57 kursi, PKI 39 kursi, dan PSII 8 (delapan) kursi dan NU 45 kursi. Meskipun Masyarakat dan PNI jumlah kursinya sama, namun PNI lebih unggul dalam peraihan suara di seluruh Indonesia.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) bagi calon guru sejarah, hendaknya selalu berusaha untuk bersikap obyektif dalam menyampaikan hasil-hasil penelitian sejarah. Pemahaman secara multi dimensi sangat diperlukan, sebab peristiwa sejarah bagaimanapun bentuknya selalu berkaitan.
- 2) bagi sejarawan, hendaknya terus menggali fakta-fakta sejarah yang ada dan terus berusaha mengembangkan hasil-hasil penelitian yang kiranya sempurna, guna mengembangkan ilmu sejarah dimasa mendatang, khususnya sejarah politik.

- 3) bagi generasi muda, hendaknya dapat mengambil hikmah dari peristiwa konflik politik tersebut terutama akibatnya. Artinya bahwa meskipun berbeda sosio kultural keagamaan janganlah perbedaan tersebut menyebabkan kemerosotan persatuan antar umat Islam. Segala sesuatu bisa dimusyawarahkan sehingga terwujud persaudaraan sesama muslim.
- 4) bagi almamater, hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadi rangsangan bagi mahasiswa atau peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian sejenis dengan lebih mendalam dalam rangka pelaksanaan dharma penelitian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Hamzah Wirjo Sukarto, 1984, Wawasan Politik Seorang Muslim Patriot Dr. Soekiman Wirjosandjojo 1898 - 1974, YP2LPM (Yayasan Pusat Pengkajian Latihan, dan Pengembangan Masyarakat, Malang. \*)
- , 1992, Kyai Haji Mas Mansur Karanganyar Terbesar, PT. Persatuan, Malang. \*)
- Abdul Azis Masyhuri, tth, Al Maghfurlah K.H.M. Bisri Syamsuri Cita-Cita dan Pengabdianya, Al Ikhlas, Surabaya. \*)
- Abu Bakar Aceh, 1957, Sejarah Hidup K.H Wahid Hasyim dan Karanganyar Tersiar, Panitia Sejarah Hidup Wahid Hasyim, Jakarta. \*)
- Alamsyah Ratu Perwiranegara, 1987, Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Alfian, 1981, Pemikiran dan Perubahan Politik Di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- , 1971, Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Lippi, Jakarta.
- Bibit Suprpto, 1988, Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. \*)
- Benda, J. Harry, 1958, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Pustaka Jaya, Jakarta. \*)
- Bulkin, Farchan, 1988, Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia, LP3ES, Jakarta. \*)
- C.S.T Kansil, 1970, Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, Pradja Paramita, Jakarta.
- Deliar Noer, 1987, Partai Islam di Pentas Nasional, Graffiti Pers, Jakarta. \*)
- Duverger, Maurice, 1984, Partai-Partai Politik Dan Kelompok-kelompok Penekan, Bina Aksara, Jakarta.
- E. Nugroho, dkk, 1990, Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 10, Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Fuad Aseyari, tth, Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia, Mizan, Surabaya.
- Feith, Herbert dan Lance Castles, 1988, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1985, LP3ES (Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Jakarta \*).
- Gottschalk, Louis, 1983, Mengerti Sejarah, (terjemahan Nugroho Notosusanto), UI Press, Jakarta.

- Ginanjar Kartasasmita, 1983, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*. PT. Tira Pustaka, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991, *Metoda Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Harun Nasution, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. IAIN Syarif Hidayatullah, Djemberatan, Jakarta.
- Inu Kencana Syafii, 1994, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineke Cipta, Jakarta.
- I.G. Widja, 1988, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Satya Wacana, Semarang.
- Kartini Kartono, 1990, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Koentjoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Eresco, Bandung.
- Lukman Ali, dkk. 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Maksiem Mohfoedz, 1982, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Yayasan Kesatuan Umat, Surabaya \*)
- Mardalis, 1990, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Suatu Proposal*. P.T. Melton Putra, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta.
- Moh. Syafaat Mintaredja, 1976, *Islam Dan Politik Islam Dan Negara Di Indonesia*. Septenarius, Jakarta. \*)
- Mohammad Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Angkasa, Bandung.
- Mohammad Nasir, 1988, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moh. Tolchah Mansoer, 1977, *Beberapa Aspek Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Di Indonesia*. Pradnya, Paramita, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1971, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Pusat Sejarah ABRI, departemen Pertahanan dan Keamanan, Jakarta.
- Rusli Karim, 1983, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*. Rajawali, Jakarta. \*)
- Sukarna, 1990, *Sistem Politik Indonesia*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saifuddin Zuhri, 1981, *Kaleidoskop Politik Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.



- Soebagijo, 1980, *K.H Mas Mansur Pembaharu Islam Di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Syafii Maarif, 1988, *Islam dan Politik Di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.
- Sutrasno, 1975, *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan (History and Science)*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Soeri Soeroto, 1980, *Bagan Sejarah Seri Pemikiran dan Metodologi Sejarah*, Fakultas Sastra UGM, Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendetakan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafii Maarif, 1988, *Islam dan Politik Di Indonesia*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta.\*)
- , 1996, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstitusnte Islam dan Masalah Kenegaraan*, LPSES, Jakarta.\*)
- Slamet Effendi Yusuf, 1983, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak Dari Pergolakan Intelektual NU*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1982, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Tatang M. Amirin, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, C.V. Rajawali Pers, Jakarta.
- Winarno Sureakhmad, 1990, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung.
- W. Poespoprodjo dan T. Gilarsa, 1989, *Subyektivitas Dalam Historiografi*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

#### B. Majalah :

- Anwar Rasjid, 1953, *Amanat Pimpinan Partai*, *Suara Partai Masyumi*, tahun ke VIII, (9):31.
- Moh. Natsir, 1953, *Sekitar Pembentukan Kabinet*, *Suara Partai Masyumi*, tahun ke VIII, (8):49.
- Tamar Djaja, 1954, *Pertukaran Tahun 1953-1954*, *Suara Partai Masyumi*, tahun ke IX, (1):6
- Syarif Usman, 1954, *Tantangan Terhadap Islam*, *Suara Partai Masyumi* tahun ke IX, (1):5-6
- Tamar Djaja, 1953, *Menuju Terbentuknya Negara Islam*, *Suara Partai Masyumi*, tahun ke VIII, (4-5):19-20.

Yusuf Wibisono, tth, Ideologi Politik Masyumi, Hikmah, tahun ke VII, (14):23.

Z. Rauf, 1945, Sekali Lagi Pemilihan Umum, Suara Partai Masyumi, tahun ke IX, (1):12.

Keterangan :

\* ) Buku Pokok



JUDUL PENELITIAN	MASALAH PENELITIAN	JENIS/SIFAT	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	H I P O T E S I S
PENGARUH KONFLIK POLITIK DALAM PERUBAHAN SUARA HASIL PEMILU 1955	Bagaimanakah pengaruh konflik politik dalam Tubuh Masyumi Terhadap Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 1955?	Jenis Penelitian : - Penelitian Historis  Sifat : - Studi Ke-pustakaan	Sumber pokok 13 buah  Sumber Penun-jang 42 buah	1. Penentuan Tepat Penelitian : purposive Sampling.  2. Pengumpulan data Metode Dokumenter  3. Analisis Data Metode Filosofik dengan teknik : a. Logika Komparatif b. Logika Induktif	Pengaruh konflik politik dalam tubuh Masyumi ialah kekuatan Masyumi menjadi terpecah belah menjelang Pemilu 1955. Sehingga dalam Pemilu 1955 perolehan suara Masyumi menjadi berkurang. Sebelumnya jumlah anggota DPR di tahun 1954 adalah : Partai Masyumi 44 orang, PNI 42 orang, PKI 17 orang, NU delapan (8) orang dan PSII empat (4) orang. Setelah Pemilu 1955 hasil perolehan suara adalah : Masyumi 57 kursi, PNI 57 kursi, PKI 39 kursi, NU 45 kursi, PSII delapan (8) kursi. Meskipun Masyumi dan PNI mempunyai jumlah suara yang sama namun PNI lebih unggul dalam perolehan suara di Indonesia.

Lampiran 2 :

SUSUNAN PENGURUS BESAR MASYUMI  
SERTA MAJELIS SYURO 7 NOPEMBER 1945

I. Susunan Pengurus Besar

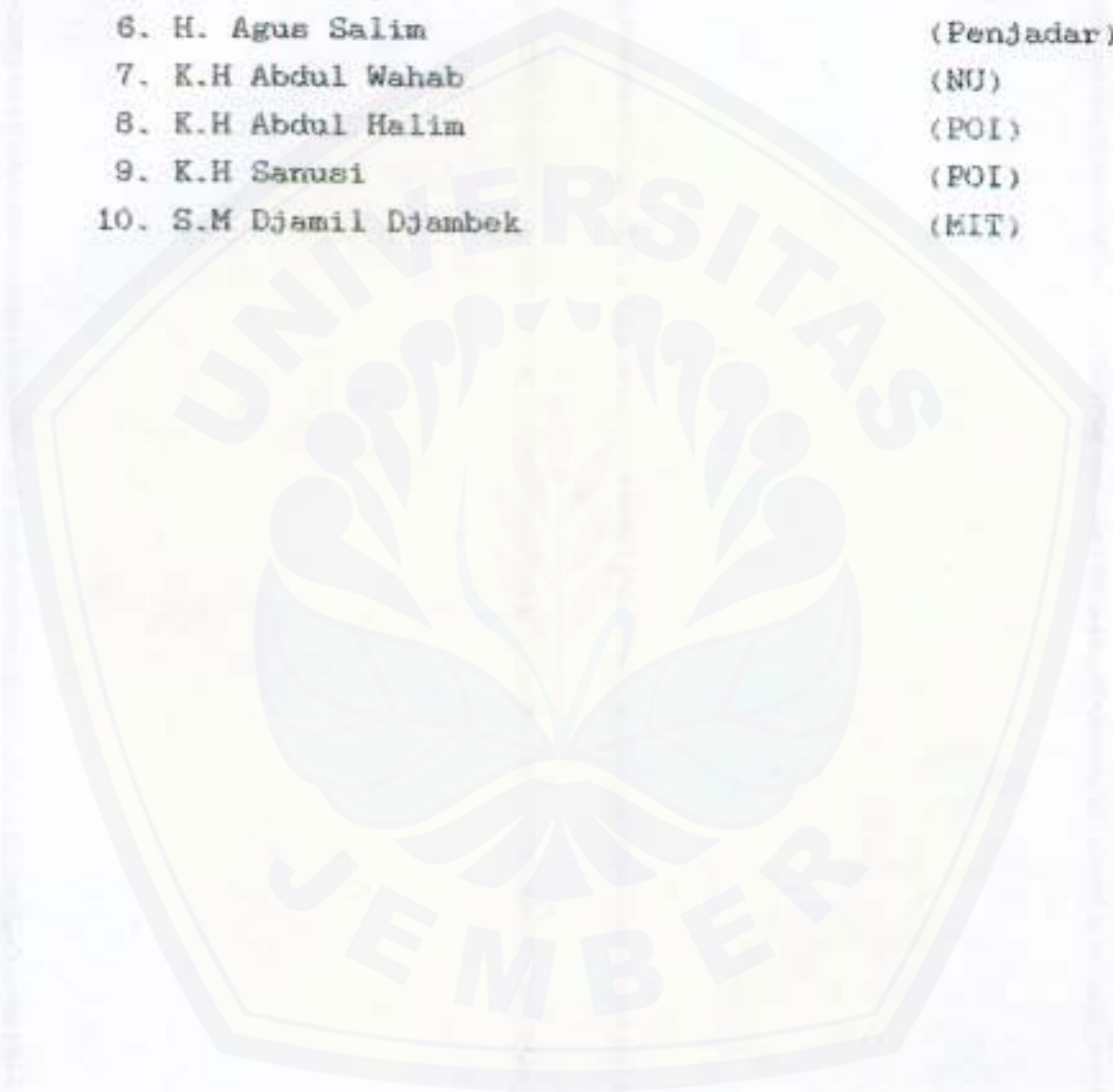
Ketua	: Dr. Sukiman Wirjosandjojo	(PII)
Ketua Muda I	: Abikusumo Cokroaminoto	(PSII)
Ketua Muda II	: Wali Al Fatah	(PII)
Sekretaris I	: Harsono Tjokroaminoto	(PSII)
Sekretaris II	: Prawoto Mangkusasmito	(Muhammadiyah)
Bendahara	: Mr. A. Kasmat	(PII)
Barisan Sabi-	: K.H Masykur	(NU)
lillah dan	: W. Wondoamiseno	(PSII)
Hisbullah	: H. Hasjim	(Muhammadiyah)
	Sulio Hadikusumo	(JIB)
Keuangan	: R. Prawiro Juwono	(Muhammadiyah)
	H. Hamid BKN	(Muhammadiyah)
Pemuda	: M. Mewardi	(Muhammadiyah)
Anggota	: K.H Dahlan	(NU)
	Farid Ma'ruf	(Muhammadiyah)
	Junus Anis	(Muhammadiyah)
	K.H Fakhri Usman	(Muhammadiyah)
	K.H Faturrahman	(NU)
	Dr. Abu Hanifah	
	Moh. Natsir	(Persis)
	S.M Kartosuwiryo	(PSII Baru)
	Anwar Tjokroaminoto	(PSII)
	Dr. Sjamsudin	(Muhammadiyah)
	Mr. Moh. Roem	(Penjadar)

Sumber : Tamar Djaja, 1953, Masjumi 8 tahun, Suara Partai Masyumi, tahun ke VIII, (10-11):9.



## II. Susunan Majelis Syuro

1. K.H Hasyim Asy'ari (NU)
2. Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)
3. K.H Wahid Hasyim (NU)
4. Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah)
5. R.H Adnan (PPDP)
6. H. Agus Salim (Penjadar)
7. K.H Abdul Wahab (NU)
8. K.H Abdul Halim (POI)
9. K.H Sarusi (POI)
10. S.M Djamil Djanbek (MIT)



Lampiran 3:

HASIL PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA  
TAHUN 1955

No Urut	Nama Daftar/Golongan Daftar	Jumlah Suara di Seluruh Indonesia	Jumlah Kursi yang didapat
1	PNI	8.434.853	57
2	Masyumi	7.903.886	57
3	NU	6.955.141	45
4	PKI	6.178.914	39
5	PSII	1.091.160	8
6	Parkindo	1.003.325	8
7	Partai Katholik	770.740	6
8	PSI	753.191	5
9	Partai Islam PERTI	483.014	4
10	IPKI	593.824	4
11	Gerakan Pembela Pancasila	219.935	2
12	Partai Rakyat Nasional	242.125	2
13	PPRI	200.419	2
14	Partai Murba	199.588	2
15	Partai Buruh	224.167	2
16	Partai Rakyat Indonesia	206.261	2
17	Partai Republik Indo.Merdeka	72.523	1
18	AKWI	61.454	1
19	ACOMA	64.514	1
20	Partai Politik Tarekat Islam	85.131	1
21	Persatuan Rakyat Desa	77.919	1
22	R.Soedjono Al Prawiro Soedarso	53.305	1
23	PIR (Wongso)	178.481	1
24	PIR (Hazairin)	114.664	1
25	Permai	149.287	1
26	Baperki	178.881	1
27	Garinda	154.791	1
28	Persatuan Daya	146.054	1
Jumlah			257

Sumber : C.S.T Kansil, 1970, Inti Pengetahuan Pemilihan Umum, Pradjna Paramita, Jakarta.

30 Partai Tani Indonesia	1 kursi
31 Pekerja	1 kursi
32 Penyakuran	1 kursi
33 PRD	1 kursi
34 Gerpis	1 kursi
35 Raja Keprabonan	1 kursi
36 PPTI	1 kursi
37 K. Nope	1 kursi
38 Per. Irian Barat	5 kursi
39 Fraksi 5 orang	5 kursi
40 Keturunan Eropa	4 kursi
41 R. Winarno Danuatmojo	1 kursi

Sumber : Bibit Suprpto, 1988, Perkembangan Kabinet Dan Pemerintahan Di Indonesia, Ghalia, Bandung, Jakarta, Halaman 172.

Lampiran

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
UPT PERPUSTAKAAN

Surat Keterangan Studi Literatur

Nomor : ...../PT 32 H .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan Sesungguhnya bahwa ;

Nama : BUDI SWANDAYANI

N I M : 9102105264

Mahasiswa : Program pend. Sejarah, FKIP, Universitas Jember.

Angkatan : 1991

Terhitung Mulai bulan Maret 1996 sampai Maret 1997 telah mengadakan Studi Literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

Tanggal	Tempat			
	R.Sirkulasi	R. Referensi	Ruang OR	R.Skripsi
12 Maret 1996	-	x	-	-
24 Maret 1996	-	x	-	-
22 April 1996	x	-	-	-
14 Juni 1996	x	-	-	-
12 Agustus 1996	-	-	x	-
5 Agustus 1996	x	-	-	-
7 September '96	-	-	-	x
16 September '96	x	-	-	-
12 Oktober 1996	-	x	-	-
15 Desember '96	-	-	-	x
13 Januari 1997	-	-	-	x
25 Februari '97	-	-	-	x
10 Maret 1997	-	x	-	-
18 Maret 1997	-	-	x	x
25 Maret 1997	x	-	-	-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat Untuk digunakan sebagaimana mestinya.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N a m a : ..EVELI. SWANDAYANI.....  
 Nim / Jurusan / Angkatan : ..9102105264.....  
 Judul Skripsi : ..BENGARAH KONFLIK PEJAJAR DALAM TUPUH  
 ..NASYUNI TERHADAP PELAKSANAAN PEMHU  
 ..Tn: 1995.....  
 Pembimbing I : ..Dra. Ari Handayani.....  
 Pembimbing II : .....  
 KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari tanggal	Materi Konsultasi	Pt. Pembimbing I
1.	Senin, 11. Nov...	Judul, Metrik	Sh
2.	Senin, 18. Nov...	Sistematiske	Sh Sh
3.	Rabu, 20. Nov...	PAB I	Sh Sh
4.	Senin, 9. Des...	PAB I	Sh Sh
5.	Kamis, 26. Des...	PAB II	Sh Sh
6.	Kamis, 2. Jan...	PAB III	Sh Sh
7.	Selasa, 7. Jan...	PAB III	Sh Sh
8.	Semin, 26. Mei...	PAB IV & V	Sh Sh
9.	Senin, 2. Juni...	PAB IV & V	Sh Sh
10.	.....	.....	.....
11.	.....	.....	.....
12.	.....	.....	.....
13.	.....	.....	.....
14.	.....	.....	.....
15.	.....	.....	.....


CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi  
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan UJIAN  
 S K R I P S I.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N A M A : .BUDI.SWANDAYANI.....  
 NIM / JURUSAN / ANKATAN : .9102105264/Pend. SEJABAH/1991.....  
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KONFLIK POLITIK DALAM TUDUH...  
 .....NASYUNI TERHADAP PELAKSANAAN PEMILU...  
 .....Th. 1955.....  
 .....  
 PEMBIMBING I :  
 PEMBIMBING II : Dr. Sutjiro.....  
 KEGIATAN KONSULTASI :

No.	Hari, tanggal	Materi Konsultasi	Tt. Pembimbing
1.	Senin, 9 Sept	Judul, Matrik	
2.	Senin, 16 Sept	Sistematika	
3.	Senin, 23 Sept	Matrik, BAB I	
4.	Senin, 3 Okt	BAB I	
5.	Senin, 14 Okt	BAB II	
6.	Senin, 21 Okt	BAB II	
7.	Senin, 28 Okt	BAB II	
8.	Jum'at, 1 Nop	BAB III	
9.	Senin, 4 Nop	BAB III	
10.	Senin, 12 Mei	BAB IV & V	
11.	Sabtu, 24 Mei	BAB IV	
12.			
13.			
14.			
15.			

- CATATAN : 1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.  
 2. Lembar ini harus dibawa sewaktu ujian PRA SKRIPSI dan ujian SKRIPSI.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Budi Swandayani
2. Tempat/langgal lahir : Magetan / 12 Agustus 1971
3. Agama : Islam
4. Nama Ayah : Pundjul Gumono
5. Nama Ibu : Sumiyati
6. Alamat
  - a. Asal : Jl. Sumatra 10A Magetan
  - b. Jember : Jl. Kalimantan XVIII/5

B. Riwayat Pendidikan (Sekolah, Luar Sekolah)

No.	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulusan
1	SDN Magetan IV	Magetan	1985
2	SMP Negeri I	Magetan	1988
3.	SMA Negeri II	Magetan	1991

C. Kegiatan Organisasi

No.	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1	Pramuka	Magetan	1989
2	Pramuka Gudip Jember 02/0/-02102	Jember	1991
3	Pengurus Kelamas Periode 1995/1996	Jember	1995